



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah Pendahuluan

Rancangan Awal Renja Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra OPD yang memuat tentang strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang RPJMD sebagai input RKPD yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai pedoman penyusunan APBD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya, substansi rancangan awal renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau TA 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Kepelabuhanan Nasional;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1); dan
39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
40. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Tujuan disusunnya Ranwal Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan Renja.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN LALU**

Pada bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, permasalahan/hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalah.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan memuat tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau serta Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaanya

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun lalu

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah membuat rencana kerja sebanyak 3 Program, 19 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rata-rata sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 100% secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja 3 program dari 3 program yang direncanakan yaitu:
  - i. Program Pengelolaan Pelayaran (100%)
  - ii. Program Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (100%)
  - iii. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)

Dengan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rata-rata keseluruhan sebesar 100% hal ini memungkinkan untuk dapat mencapai target kinerja pada Renstra Dinas Perhubungan maupun target kinerja pada RPJMD provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan untuk mendukung program strategis nasional terkait program Nawacita Presiden Joko Widodo sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau untuk mempercepat program pembangunan infrastruktur. Dengan daerah bercirikan kepulauan sudah semestinya Pemerintah Daerah lebih fokus pada pembangunan kemaritiman dimana infrastruktur perhubungan laut menjadi tulang punggung konektivitas daerah dengan luasan mencapai 96% dari jumlah luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Gambaran evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:



**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun Lalu	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor</b>		500	-	100	100	100	100	200	40
1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		500	-	100	100	100	100	200	40
1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40
1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40
1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	-	3	3	100	3	6	40
1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	-	1	1.00	100	1	2	40
1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		500	-	100	100	100	100	200	40
1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Tahun	3,990	-	798	798	100	840	1638	41
1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	-	12	12	100	12	24	40
1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	-	1	1	100	1	2	40

No		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun Lalu	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	100	-	20	20	100	20	40	40
1:03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		500	-	100	100	100	100	200	40
1:03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	-	1	1	100	1	2	40
1.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</b>		60	-	12	12	100	12	24	40
1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40
1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	60	-	12	12	100	12	24	40
1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</b>	%	70	-	15	7	47	15	22	31
1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	15	-	3	3	100	3	6	40
1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	-	1	1	100	1	2	40
1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	285	-	57	57	100	57	114	40
1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	285	-	57	57	100	79	136	48

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun Lalu	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		500	-	100	100	100	100	200	40
1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	10	-	2	2	100	2	4	40
1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	15	-	3	3	100	5	8	53
1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	15	-	3	3	100	3	6	40
1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	60	-	12	12	100	12	24	40
1.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	60	-	12	12	100	12	24	40
1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	-	12	12	100	12	24	40
1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		500	-	100	100	100	100	200	40
1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	25	-	5	5	100	5	10	40
1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	5	-	1	1	100	1	2	40
1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		500	-	100	100	100	100	200	40
1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	-	12	12	100	12	24	40
1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	60	-	12	12	100	12	24	40

No		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun Lalu	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	-	12	12	100	12	24	40
1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	-	12	12	100	12	24	40
1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	75	-	15	15	100	15	30	40
1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	-	6	6	100	6	12	40
1.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	1	1	100	1	2	200
1.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	-	1	1	100	1	2	40
		<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	175	-	165	101	61.21	165	266	152
1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	128	-	23	47	204.3	23	70	55
1.05		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	Laporan	10	-	2	2	100	2	4	40

No		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun Lalu	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	5	-	1	1	100	1	2	40
1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	5	-	1	2	200	1	3	60
1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi dikeluarkan	Dokumen	20	-	4	4	100	4	8	40
1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	10	-	2	2	100	2	4	40
1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	10	-	2	2	100	2	4	40
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	25	-	5	5	100	5	10	40

No		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun Lalu	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan	25	-	5	5	100	5	10	40
1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	25	-	5	5	100	5	10	40
1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	%	500	-	100	100	100	100	200	40



No		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun Lalu	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan	5	-	1	1	100	1	2	40
1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Komersial/Niaga terbangun/meningkat kapasitasnya	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	5	-	1	1	100	1	2	40
1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	5	-	3	3.00	100	1	4	80
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	5	-	1	1	100	1	2	40
1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	5	-	1	1	100	1	2	40
1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	5	-	1	1	100	1	2	40

No		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja s/d Tahun Lalu	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan kegiatan Renja tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan terkelola dan beroperasi dengan baik	%	500	-	100	100	100	100	200	40
1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit	35	-	35	7	20	7	14	40
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	5	-	1	1.00	100	1	2	40
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	5	-	1	1.00	100	1	2	40
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	9	-	3	3.00	100	3	6	67
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	5	-	1	1.00	100	1	2	40
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	5	-	1	1.00	100	1	2	40

## 2.2 Analisis Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Target Indikator Kineja Kunci (IKK) yaitu Rasio Konektivitas Provinsi sebesar 41,33% (0,41) diperkirakan target tersebut akan dapat dicapai sebesar 100%, target Rasio Konektivitas Provinsi terdiri dari 3 (tiga) bagian sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi yaitu:

- a. Rasio Konektivitas Angkutan Darat sebesar 18% (0,18);
- b. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan 26,25% (0,26);
- c. Rasio Konektivitas Angkutan Laut 36,36% (0,36);

Secara Nasional masih terdapat bagian yang harus diukur yaitu Rasio Konektivitas Angkutan Udara, Rasio Konektivitas Angkutan Kereta Api dan Rasio Konektivitas Angkutan Perkotaan, akan tetapi karena Angkutan Udara merupakan kewenangan pusat serta Angkutan Kereta Api dan Angkutan Perkotaan tidak terdapat di Provinsi Kepulauan Riau maka rasionya tidak dimasukkan kedalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Gambaran pencapaian pelayanan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau**

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Dinas Perhubungan					Capaian Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023
1	2	2.a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Konektivitas Provinsi	%			41.33	44.25	47.17	50.08	65	38.42	42	44.25	
a	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	%			18	18	18	18	30	18	18	18	
b	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	%			31.82	36.36	40.91	45.45	50.00	27.27	32.00	36.36	
c	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	%			23.33	26.25	29.17	32.08	35.00	20.42	24.00	26.25	

### 2.3 Isu-isu Penting Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebagai perangkat daerah yang mengurus masalah transportasi dan pengelolaannya dapat melaksanakan amanat peraturan perundangan yang dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan angkutan umum baik laut, udara dan darat yang belum terlayani secara optimal
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang melayani masyarakat baik dalam bidang transportasi laut, udara dan Lalu lintas angkutan jalan.
3. Meningkatkan kinerja sektor perhubungan dalam pengelolaan ruang laut sebagaimana amanat peraturan perundangan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berguna untuk pembangunan berkelanjutan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Visi Gubernur telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”*** Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 misi, Dinas Perhubungan Kepulauan Riau akan berkontribusi dalam mewujudkan Misi ke-1 yaitu Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran Rakyat dan Misi ke-5 yaitu Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan. Adapun tujuan yang terkait yaitu:

- 1) Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi
- 2) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau
- 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif

Dalam Rancangan awal RKPD Provinsi Kepri tahun 2023 telah ditetapkan prioritas pembangunan khususnya di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kepulauan Riau mendukung sasaran:

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
- 3) Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah

hasil penelaahan terhadap kesesuaian program dan kegiatan dari masyarakat, instansi terkait maupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Target Satuan	Lokasi
I	Program Pengelolaan Pelayaran		
A.	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
A.1	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Unit	
1	Pembangunan Pelabuhan-Provinsi Kepulauan Riau	-	KOTA SEGARA (BINTAN), Letung (Anambas), Mepar (Lingga), Dabo Singkep (Lingga)
2	Pembangunan Lahan Parkir Pelabuhan Kuala Riau	4775	TPI
3	Hibah Uang Pemb Rumah Ibadah Lingkungan Pelabuhan Kuala Riau	1 Unit	TPI
4	Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan	1 Unit	DUSUN SELAT BINGA DESA RAWA JAYA - KARIMUN
5	Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan	1 Unit	DUSUN PASAI DESA NIUR PERMAI - KARIMUN
6	Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan	1 Unit	DUSUN TANJUNG SESOP DESA SUGIE - KARIMUN



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Target Satuan	Lokasi
7	Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan	1 Unit	Serengeh - Desa Degong KARIMUN
8	Pengadaan Rambu Laut	1 Unit	Kab. Natuna
9	Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Parit Rempak Kecamatan Meral Barat	1 Unit	Meral Barat
10	Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Rawa Jaya Kecamatan Sugi	1 Unit	Sugi
11	Pembangunan Pelabuhan Buluh Patah	1 Unit	Buluh Patah/ Moro
12	Peningkatan Pelabuhan Penumpang Desa Tanjung Hutan	1 Unit	Tanjung Hutan/ Buru
13	Pembangunan Pelantar Beton	1 Unit	Kampung Batu Putih - Karas, Kecamatan Galang (P 428,5 m' L 2,5 m)
14	Pembangunan Pelantar Beton	1 Unit	Teluk Kangkung, Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang (P 283 m' L 2,5 m)
15	Pembangunan Pelantar Beton	1 Unit	Pulau Gara, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang (P 190 m' L 2 m)
16	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan	1 Unit	Desa Mentebung Kecamatan Tambelan
17	Pembangunan Pelabuhan Apung Desa Tanjung Kumbik	1 Unit	Desa Tanjung Kumbik Kecamatan Pulau Tiga Barat
18	Pembangunan Ponton HDPE Pelabuhan Selat Lampa Kab. Natuna	1 Unit	
19	Pembangunan Pelabuhan Apung HDPE Sungai Besar Kec. Pulau Tiga	1 Unit	Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga
20	Tambahan Ponton HDPE Pelabuhan Sedanau		Kab Natuna
21	Pembangunan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Kampung Baru	1 Unit	Kec. Palmatak
22	Pembangunan Pelabuhan Apung HDPE Pian Pasir ke Siantan Utara	1 Unit	Kec. Siantan Utara
23	Pembangunan Pelabuhan Apung HDPE Pelabuhan Jemaja	1 Unit	Kec. Jemaja
24	Pembangunan Pelabuhan Pekajang	1 Unit	Pekajang Lingga
25	Pembangunan Dermaga Rakyat	1 Unit	Dusun I Kp. Pengambil, Kab.Lingga
26	Pembangunan Ponton HDPE Pelabuhan Jagoh Kab. Lingga	1 Unit	Kecamatan Katang Bidare Desa Baran Kab. Lingga
27	Pembangunan Pelabuhan Ponton HDPE Jagoh Kab. Lingga	1 Unit	Jagoh Kab Lingga
28	Lanjutan Penataan Parkir Pelabuhan Letung	1 Unit	Kab Anambas
29	Lanjutan Pembangunan Gedung Polairud Tanjungpinang	1 Unit	Kota Tanjungpinang
B.	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Unit	
1	Revitalisasi Dermaga Pengumpang Pelabuhan Kuning	1 Paket	Pelantar Kuning Kota Tanjungpinang
2	Rehabilitasi Dermaga Senggarang	1 Paket	Senggarang Kota Tanjungpinang
3	Rehabilitasi Dermaga Kampung Bugis (+biaya jasa konsultasi pengawasan konstruksi)	1 Paket	Kp Bugis Kota Tanjungpinang
4	Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan	1 Unit	(RT 001 RW 003 Dusun II Desa Degong Kec.Belat Kab.Karimun, KAB. KARIMUN)
5	Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan	1 Unit	(Kecamatan Pulau 3, KAB. NATUNA)
6	Lanjutan Rehabilitasi Pelabuhan Mepar	1 Unit	Kab Lingga

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Pekerjaan	Target Satuan	Lokasi
II	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>		
A.	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>		
A.1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Unit	
1	Ketersediaan prasarana lalu lintas masih belum optimal (Unit Pengadaan Lampu Jalan)	10 Unit	Kab. Karimun
2	Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan Pengadaan dan pemasangan marka jalan / zebra cross /pita pengaduh dan (zoss)	5 Unit	Kab. Lingga
3	Pemasangan PJU 200 titik di Pulau Kundur	200 Unit	Pulau Kundur Kab. Karimun
4	Belanja Pengadaan Alat Uji Kendaraan	6 Unit	JL. Tata Bumi Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya. Kantor UPT PKB DISHUB BINTAN
5	Belanja Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	10 Unit	SMP 13 - KM.77
6	Belanja Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	25 Unit	Traffic Light Pasar Tani ke Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan
7	Belanja Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	5 Unit	Simpang Ceruk Ijuk - KM.29 Bukit Samak, Kecamatan Toapaya
8	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (Tenaga Surya) di Kab. Kepulauan Anambas	450 Unit	Pulau Siantan, Palmatak dan Jemaja
9	Belanja Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1.500 Unit	1500 Unit	Ruas Jalan Sp. Budus - Penarik
10	Pengadaan Mobil Crane PJU (2 Unit)	2 Unit	Dishub Kab. Lingga

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

##### **3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Daerah**

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Elemen utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggungjawab.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas juga mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Di dalam perencanaan pembangunan terdapat sejumlah kegiatan yang diusulkan melalui mekanisme forum musyawarah perencanaan pembangunan. Rencana program yang diusulkan tidak mungkin semua akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas untuk menentukan mana kegiatan yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak dalam sebuah anggaran pembangunan. Penentuan skala prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 dalam rangka penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang pendanaannya secara umum bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Namun ada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersumber dari luar APBD, yaitu dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang datang atas partisipasi masyarakat ataupun dunia usaha.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 bidang perhubungan diuraikan sebagai berikut;

##### **a. Program Pengelolaan Pelayaran**

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahun 2024</b>
1	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	60

2	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintasan	20
3	Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran	%	81,82
4	Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan	%	83,33
5	Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik	%	100
6	Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	%	100

**b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024
1	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	99,68
2	Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	6

**c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan pada program ini diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja program sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024
1	Nilai SAKIP	%	75

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam rencana kerja, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun dan dituangkan dalam dokumen Rencana kerja (Renja). Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**a. Tujuan**

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tujuan jangka menengah adalah:

- 1) Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir;
- 3) Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

**b. Sasaran**

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai sasaran jangka menengah yaitu :

1. Peningkatan PAD Sektor Perhubungan;
2. Meningkatnya Pembangunan/ Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga;
3. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat;
4. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Penyeberangan;
5. Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Laut; dan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

Selengkapnya Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan			7.201,5 Juta	8.658 Juta	13.241 Juta	14.848,3 Juta	18.988,1 Juta
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan	6.470 Juta	7.860 Juta	9.250 Juta	10.640 Juta	14.550 Juta
				Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	60   Juta	80   Juta	3.194,5 Juta	3.349,3 Juta	5.516,6 Juta
				Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Laut	671,5 Juta	734   Juta	796,5 Juta	859   Juta	921,5 Juta
			Meningkatnya Pembangunan/Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	20%	40%	60%	80%	100%



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9
2	Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Provinsi			41,33 %	44,25%	47,17%	50,08%	65%
			Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	18%	18%	18%	18%	30%
			Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Penyeberangan	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	23,33%	26,25%	29,17%	32,08%	35%
			Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Laut	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	31,82%	36,36%	40,91%	45,45%	50%
3	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP			70	72,5	75	77,5	80
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP	70	72,5	75	77,5	80

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yaitu melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Provinsi dalam bidang perhubungan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, keselamatan dan ketertiban. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau secara langsung mendukung program Prioritas Provinsi yang mengacu pada perencanaan pembangunan pusat dan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik secara langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Rencana pendanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 terdiri dari 3 program, 31 Kegiatan dan 88 Sub Kegiatan dengan Rencana pagu Rp. 64.590.036.790,-

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya yaitu :
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
      - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan
      - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
      - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
      - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat, dengan sub kegiatannya yaitu:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
  - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barmg Milik Daerah SKPD
  - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
  - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  - f. Penatusahaan Barang Milik Daerah SKPD
  - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut ;
  - a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
  - b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
  - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
  - d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
  - e. Pengolahan Data Retribusi
  - f. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
  - g. Pelaporan Wajib Retribusi Daerah
- 5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut;
  - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai

- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
  - f. Penyediaan Bahan/Material
  - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pengadaan Mebel
  - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - f. Pengadaan Aset Tak Berwujud
  - g. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel

- d. Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya
  - e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
- II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kegiatannya terdiri dari :
- 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
    - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
    - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
    - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
    - d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
    - a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
    - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
    - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
    - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan Jalan
  - 2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
    - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
    - b. Pembangunan Gedung Terminal
    - c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
    - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
    - e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
  - 3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
    - a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
    - b. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    - c. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
    - d. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
    - e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi

4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
  - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
  - b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
  - d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - a. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
  - b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  - c. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
  - d. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
  - e. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
6. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
7. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
  - b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
  - b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi
9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
  - b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
10. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Perkotaan Kewenangan Provinsi
  - b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1(satu) Daeah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
13. Penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah provinsi

III. Program Pengelolaan Pelayaran. Kegiatannya terdiri dari :

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
3. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi
4. Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
  - a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

5. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  - b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
6. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
  - a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
7. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
  - a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota

8. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
  - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
9. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
  - b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
  - c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
  - d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
10. Pembangunan dan penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - a. Fasiliatasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayel Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
  - d. Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
- 12. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
  - a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
- 13. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
  - a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
- 14. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  - a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 15. Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
  - a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 16. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
  - a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.

#### **4.2. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.**

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau memiliki Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat 5 (lima) UPT Penyelenggaraan Pelabuhan yang tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam;
2. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun;
3. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;
4. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga.

Masing – masing Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan memiliki rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam
  - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya yaitu :
    1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - II. Program Pengelolaan Pelayaran , dengan kegiatannya yaitu :
    1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan Sub Kegiatan :
      - a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
2. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun
  - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya yaitu :

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- II. Program Pengelolaan Pelayaran , dengan kegiatannya yaitu :
  1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan Sub Kegiatan :
    - a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
3. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
  - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya yaitu :
    1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - II. Program Pengelolaan Pelayaran , dengan kegiatannya yaitu :
    1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan Sub Kegiatan :
      - a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
4. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas
  - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya yaitu :
    1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - II. Program Pengelolaan Pelayaran , dengan kegiatannya yaitu :
    1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan Sub Kegiatan :
      - a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
5. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga
  - I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya yaitu :
    1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
      - a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - II. Program Pengelolaan Pelayaran , dengan kegiatannya yaitu :

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan Sub Kegiatan :
  - a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional



**Tabel 4.1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	Kepulauan Riau	100	25,107,820,000			100	44,181,817,858
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Kepulauan Riau	100	1,100,000,000			100	2,100,000,000
1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	Kepulauan Riau	3	300,000,000	APBD		3	300,000,000
1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	kepulauan Riau	-	-	APBD		1	300,000,000
1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	300,000,000
1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	300,000,000
1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	300,000,000
1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	Kepulauan Riau	1	300,000,000	APBD		1	300,000,000
1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	Kepulauan Riau	1	500,000,000	APBD		1	300,000,000
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Kepulauan Riau	100	15,000,000,000			100	16,800,000,000
1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Org/Blu	Kepulauan Riau	55	13,500,000,000	APBD		55	14,500,000,000
1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya pembayaran Tunjangan Pengelolaan Keuangan	Laporan	Kepulauan Riau	1	1,200,000,000	APBD		1	1,300,000,000
1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	500,000,000
1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	Laporan	Kepulauan Riau	1	200,000,000	APBD		1	500,000,000

NO		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	Kepulauan Riau	100	100,000,000			100	600,000,000
1:03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	300,000,000
1:03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	300,000,000
1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Kepulauan Riau	12	200,000,000			12	200,000,000
1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	100,000,000
1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Kepulauan Riau	12	100,000,000	APBD		12	100,000,000
1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	%	Kepulauan Riau	60	485,000,000			65	3,800,000,000
1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Kepulauan Riau	3	200,000,000	APBD		5	500,000,000
1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan peilaian kinerja pegawai	Dokumen	Kepulauan Riau	1	85,000,000	APBD		1	300,000,000
1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	Kepulauan Riau	5	150,000,000	APBD		55	1,500,000,000
1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kepulauan Riau	-	-	APBD		55	500,000,000
1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kepulauan Riau	16	50,000,000	APBD		55	1,000,000,000
1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Kepulauan Riau	100	2,275,020,000			100	8,200,000,000
1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	frekuensi komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	Kepulauan Riau	1	25,000,000	APBD		1	400,000,000

NO		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Kepulauan Riau	1	200,000,000	APBD		1	300,000,000
1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	Kepulauan Riau	-	-	APBD		2	500,000,000
1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	Kepulauan Riau	1	300,000,000	APBD		2	500,000,000
1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Pemenuhan Barang Cetak	Paket	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		3	300,000,000
1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	Kepulauan Riau	1	50,000,000	APBD		3	300,000,000
1.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan kunjungan tamu	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,020,000	APBD		1	300,000,000
1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kepulauan Riau	1	1,500,000,000	APBD		1	5,100,000,000
1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis	Dokumen	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	200,000,000
1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Frekuensi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bulan	Kepulauan Riau	-	-	APBD		12	300,000,000
1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah`	%	Kepulauan Riau	100	825,000,000			100	2,000,000,000
1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		unit		1	600,000,000	APBD		-	-
1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Paket	Kepulauan Riau	1	50,000,000	APBD		5	500,000,000
1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	unit	Kepulauan Riau	5	100,000,000	APBD		5	500,000,000
1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	Kepulauan Riau	1	75,000,000	APBD		5	500,000,000
1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	Kepulauan Riau	-	-	APBD		5	500,000,000
1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Kepulauan Riau	100	4,372,800,000			100	4,781,817,858
1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kepulauan Riau	1	50,000,000	APBD		1	300,000,000

NO		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		1	300,000,000
1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	Kepulauan Riau	1	192,000,000	APBD		1	300,000,000
1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kepulauan Riau	1	3,980,800,000	APBD		1	3,881,817,858
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor-UPT 1	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kepulauan Riau	1	268,800,000	APBD		1	268,800,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT II	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kepulauan Riau	1	302,400,000	APBD		1	302,400,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT III	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kepulauan Riau	1	705,600,000	APBD		1	705,600,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT IV	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kepulauan Riau	1	302,400,000	APBD		1	302,400,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT V	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	Kepulauan Riau	1	201,600,000	APBD		1	201,600,000
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	Kepulauan Riau	100	750,000,000			100	5,700,000,000
1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara, dan terbayar pajak	unit	kepulauan Riau	14	500,000,000	APBD		15	2,300,000,000
1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara, dan terbayar pajak	unit	kepulauan Riau	-	-	APBD		2	500,000,000
1.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang terpelihara	unit	kepulauan Riau	-	-	APBD		5	200,000,000
1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	unit	kepulauan Riau	6	100,000,000	APBD		6	500,000,000
1.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		3	1,000,000,000
1.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor, perlengkapan kantor	Unit	Kepulauan Riau	-	-	APBD		5	1,000,000,000
1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang di rehabilitasi	M2	Kepulauan Riau	100	-	APBD		100	200,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	Kepulauan Riau	99.68	2,682,216,790			99.79	1,369,918,488
		Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	Kepulauan Riau	6				6	
		Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Bidang Perhubungan Darat	Rp (Juta)	Kepulauan Riau	3194.5				3349.3	
1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Penyediaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	Kepulauan Riau	1	180,000,000			-	-
1.01	01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tersedia	Dokumen	Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		-	-
1.01	02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi ditetapkan	Laporan	Kepulauan Riau	1	15,000,000	APBD		-	-
1.01	03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi dilakukan	Laporan	Kepulauan Riau	1	15,000,000	APBD		-	-
1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	%	Kepulauan Riau	99.68	1,727,216,790			99.79	544,918,488
1.02	01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Prasarana Jalan di Jalan Provinsi Terbangun (JPO/Halte)	Unit	Kepulauan Riau	1	180,000,000	APBD		-	-
1.02	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan terpasang	Unit	Kepulauan Riau	1,437	1,500,000,000	APBD		50	100,000,000
		Jumlah Perlengkapan Jalan terpasang	M2	Kepulauan Riau	140	-	APBD		280	100,000,000
		Jumlah Perlengkapan Jalan terpasang	Titik	Kepulauan Riau	1	-	APBD		1	100,000,000
1.02	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah JPO/Halte terpelihara	Unit	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	100,000,000
1.02	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan terpelihara	Unit	Kepulauan Riau	23	47,216,790	APBD		47	94,918,488
		Jumlah Perlengkapan Jalan terpelihara	M2	Kepulauan Riau	-	-	APBD		140	50,000,000
1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Unit	Kepulauan Riau	-	-			1	50,000,000
1.03	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe B Terpelihara	Unit	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	50,000,000

NO		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	1	375,000,000			2	60,000,000
1.05	03	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Laporan		1	200,000,000	APBD		-	-
1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi dilaksanakan	Laporan	Kepulauan Riau	1	75,000,000	APBD		1	30,000,000
1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi diselenggarakan	Rapat	Kepulauan Riau	2	100,000,000	APBD		1	30,000,000
1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi dikeluarkan	Dokumen	Kepulauan Riau	1	100,000,000			1	50,000,000
1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dilakukan	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	25,000,000
1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin dilakukan	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	25,000,000
1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000			1	325,000,000
1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi dilakukan	Orang	Kepulauan Riau		-	APBD		25	300,000,000
1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dilakukan	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	25,000,000
1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000			1	50,000,000
1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi dilakukan	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	50,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Kepulauan Riau	-	-			1	50,000,000
1.09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kepulauan Riau		-	APBD		1	50,000,000
1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kepulauan Riau		-			1	50,000,000
1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kepulauan Riau		-	APBD		1	50,000,000
1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	Kepulauan Riau	-	-			1	50,000,000
1.11	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kepulauan Riau		-			1	50,000,000
1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Kepulauan Riau	-	-			1	50,000,000
1.12	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	50,000,000
1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	Kepulauan Riau	60	100,000,000			60	50,000,000

NO		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dilakukan	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	50,000,000
1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	-	-			1	50,000,000
1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dilakukan	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	50,000,000
1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	-	-			1	50,000,000
1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi dilakukan	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	Kepulauan Riau	60	36,800,000,000			80	14,549,062,614
			Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas		20				22	
			Persentase ketersediaan lintas angkutan pelayaran	%	Kepulauan Riau	81.82				90.91	
			Persentase ketersediaan lintas angkutan Penyeberangan	%	Kepulauan Riau	83.33				91.67	
			Persentase Pelabuhan Laut Beroperasi dan dalam Kondisi baik	%	Kepulauan Riau	100				100	



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi	%	Kepulauan Riau	100				100	
1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	%	Kepulauan Riau	45	150,000,000			70	100,000,000
1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi	Kepulauan Riau	-	-	APBD		5	50,000,000
1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		5	50,000,000
1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	%	Kepulauan Riau	53	150,000,000			75	100,000,000
1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi	Kepulauan Riau	-	-	APBD		1	50,000,000
1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		1	50,000,000
1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	%	Kepulauan Riau	50	150,000,000			75	100,000,000

NO		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Kepulauan Riau	-	-			1	50,000,000
1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	1	150,000,000			1	50,000,000
1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	Kepulauan Riau	83.33	100,000,000			91.67	100,000,000
1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Tersedia	Laporan	Kepulauan Riau	-	-			1	50,000,000
1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD		1	50,000,000
1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	%	Kepulauan Riau	57.86	150,000,000			78.57	100,000,000

NO		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Kepulauan Riau	1	-	APBD		1	50,000,000
1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan	Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD		1	50,000,000
1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya	Laporan	Kepulauan Riau	1	25,000,000			1	25,000,000
1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Kepulauan Riau	1	25,000,000	APBD		1	25,000,000
1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Pengendalian Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	3	25,000,000			3	25,000,000
1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional tersusun	Dokumen	Kepulauan Riau	-	-			-	-
1.08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional ditetapkan	Dokumen	Kepulauan Riau	-	-			-	-

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Pengendalian Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	1	25,000,000		1	25,000,000
1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Pelabuhan Komersial/Niaga terbangun/meningkat kapasitasnya	%	Kepulauan Riau	60	35,350,000,000		80	13,409,062,614
1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Fasilitasi	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD	1	50,000,000
1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Regional terbangun	Unit	Kepulauan Riau	1	27,150,000,000	APBD	1	11,104,062,614
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (DINAS)	Pelabuhan Pengumpan Regional Beroperasi dan terpelihara	Unit	Kepulauan Riau	5	5,000,000,000	APBD	5	1,000,000,000
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional-UPT 1	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit	Kota Batam	1	500,000,000	APBD	1	175,000,000
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional-UPT 2	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit	Kab. Karimun	1	500,000,000	APBD	1	245,000,000
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional-UPT 3	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit	Kota TPI dan Kab Bintan	3	1,000,000,000	APBD	3	425,000,000
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional-UPT 4	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit	Kab. Natuna dan Kab. Kep	1	500,000,000	APBD	1	215,000,000
1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional-UPT 5	Pelabuhan Beroperasi dan terpelihara	Unit	Kab. Lingga	1	500,000,000	APBD	1	145,000,000
1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	1	100,000,000	APBD	1	50,000,000
1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi beroperasi dan terpelihara	%	Kepulauan Riau	100	650,000,000		100	350,000,000
1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Beroperasi	Unit	Kepulauan Riau	2	500,000,000	APBD	2	300,000,000
1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	Kepulauan Riau	1	150,000,000	APBD	1	50,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-		1	70,000,000
1.11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi	Kepulauan Riau	-	-	APBD	1	20,000,000
1.11	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD	1	50,000,000
1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-		1	25,000,000
1.12	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD	1	25,000,000
1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-		1	25,000,000
1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD	1	25,000,000
1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-		1	25,000,000
1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD	1	25,000,000
1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-		3	25,000,000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	-	-	APBD	3	25,000,000
1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	1	50,000,000		2	70,000,000
1.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi	Kepulauan Riau	-	-	APBD	1	20,000,000
1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	Kepulauan Riau	1	50,000,000	APBD	1	50,000,000
JUMLAH						64,590,036,790				60,100,798,960

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Tanjungpinang, 14 Juni 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**JUNAIDI, SE, MH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690719 199703 1 001